

# **Analisis Mendalam Kerusuhan Poso: Pelajaran untuk Pencegahan Konflik di Indonesia**

Oleh Pusat Studi Teknologi dan Kebijakan Publik (PSTKP) - 2005

[www.pstkp.org](http://www.pstkp.org)

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>2</b>
<b>I. Pendahuluan.....</b>	<b>3</b>
Latar Belakang Konflik Komunal di Indonesia Pasca-Reformasi.....	3
Signifikansi Kerusuhan Poso sebagai Studi Kasus.....	3
Tujuan dan Struktur Laporan.....	4
<b>II. Analisis Kerusuhan Poso.....</b>	<b>4</b>
A. Kerusuhan Poso: Sifat dan Karakteristik Konflik.....	4
B. Para Aktor dan Kelompok yang Terlibat.....	5
C. Kronologi dan Fase-fase Konflik.....	6
D. Wilayah Konflik.....	8
E. Akar Masalah dan Pemicu Konflik.....	8
F. Dinamika Eskalasi dan Upaya Penanganan.....	10
<b>III. Dampak Konflik Poso.....</b>	<b>11</b>
Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	11
Dampak Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM.....	12
Dampak Psikologis dan Kohesi Sosial.....	13
<b>IV. Pelajaran Penting dan Rekomendasi Pencegahan Konflik.....</b>	<b>13</b>
A. Pentingnya Pengelolaan Keberagaman dan Toleransi.....	13
B. Bahaya Politisasi Identitas dan Perlunya Pemerataan Pembangunan.....	14
C. Urgensi Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik.....	14
D. Peran Krusial Dialog Antar Komunitas dan Penegakan Hukum yang Adil.....	15
E. Pendekatan Komprehensif dalam Pemulihan Pasca-Konflik.....	15
F. Peran Aktif Masyarakat Sipil dan Pendidikan Multikultural.....	16
<b>V. Kesimpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>16</b>
Rangkuman Temuan Utama.....	17
Pelajaran Penting dan Rekomendasi untuk Masa Depan Indonesia.....	17
<b>Karya yang dikutip.....</b>	<b>18</b>

# I. Pendahuluan

## Latar Belakang Konflik Komunal di Indonesia Pasca-Reformasi

Indonesia, sebagai negara majemuk dengan beragam etnis, agama, dan budaya, secara inheren menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman tersebut. Periode pasca-Reformasi 1998 menjadi saksi lonjakan signifikan konflik komunal yang bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), yang mengakibatkan kerugian besar baik harta benda maupun nyawa manusia. Contoh-contoh konflik serupa yang terjadi pada era ini meliputi bentrokan antara Dayak dan migran Madura di Sambas, Kalimantan Barat (1999), serta di Kalimantan Tengah (2001). Konflik lain juga terjadi di Kupang antara penganut Kristen Timur-Timur dan kelompok Butan, Bugis, Makassar (BBM) pada tahun 1999, yang kemudian berkembang menjadi konflik agama. Demikian pula di Ambon, terjadi konflik antara Kristen Ambon dan BBM pada tahun yang sama, serta di Maluku Utara pada tahun 2000, yang semuanya berujung pada konflik agama.

Transisi politik yang terjadi pasca-Reformasi 1998, dengan perubahan dari pemerintahan sentralistik otoriter menuju desentralisasi dan demokrasi, secara tidak terduga menciptakan arena baru bagi persaingan dan konflik, khususnya di kalangan elit lokal yang memperebutkan kekuasaan. Melemahnya kontrol pusat memungkinkan ketegangan laten yang sebelumnya terpendam untuk muncul ke permukaan dan meningkat dengan lebih mudah.<sup>1</sup> Masa transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, terutama yang disertai desentralisasi, dapat menjadi fase yang sangat rentan. Keluhan-keluhan yang sudah ada, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dapat dieksploitasi dalam lanskap politik yang lebih terbuka. Kondisi ini menggarisbawahi betapa pentingnya mekanisme pencegahan dan pengelolaan konflik yang kuat selama periode perubahan semacam itu.

## Signifikansi Kerusuhan Poso sebagai Studi Kasus

Kerusuhan Poso merupakan salah satu konflik antar kelompok agama yang paling berkepanjangan dan brutal di Indonesia pasca-Reformasi, berlangsung dari Desember 1998 hingga secara resmi berakhir dengan Deklarasi Malino pada Desember 2001.<sup>1</sup> Namun, dampaknya masih terasa dan menyisakan tantangan hingga saat ini.<sup>1</sup> Konflik ini meninggalkan trauma mendalam dan kemiskinan yang meluas di masyarakat Poso.<sup>1</sup>

Meskipun seringkali dibingkai sebagai konflik agama, akar permasalahan di Poso jauh lebih kompleks dan melibatkan faktor historis, ekonomi, dan politik yang saling terkait.<sup>2</sup> Konflik di Poso bukan sekadar bentrokan identitas keagamaan, melainkan perpaduan rumit dari berbagai ketegangan sosial yang ada. Sifatnya yang "berkepanjangan dan bertahap" <sup>1</sup> semakin menegaskan kompleksitas ini, menunjukkan bahwa solusi sederhana tidak akan memadai.

Mempelajari kasus Poso secara mendalam memberikan pelajaran krusial untuk memahami dan menangani konflik yang tampak berbasis identitas (SARA) namun sesungguhnya didorong oleh isu-isu struktural yang mendasar. Hal ini menekankan perlunya pendekatan multi-aspek dalam analisis dan resolusi konflik, melampaui interpretasi yang dangkal.

## Tujuan dan Struktur Laporan

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai kerusuhan Poso berdasarkan kerangka 5W1H, mengidentifikasi akar masalah, dinamika eskalasi, dampak yang ditimbulkan, serta merumuskan pelajaran penting yang dapat dipetik untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Struktur laporan ini akan mengikuti kerangka analisis yang komprehensif untuk memastikan cakupan yang menyeluruh dan relevan.

# II. Analisis Kerusuhan Poso

## A. Kerusuhan Poso: Sifat dan Karakteristik Konflik

Kerusuhan Poso adalah serangkaian konflik komunal yang melibatkan pertikaian sengit antara kelompok masyarakat Kristen dan Islam di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.<sup>1</sup> Konflik ini secara luas dikenal sebagai konflik SARA, yang mencakup dimensi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan.<sup>2</sup>

Konflik ini menimbulkan kerugian fisik dan korban jiwa yang masif. Data menunjukkan bahwa sebanyak 577 jiwa tewas dan 384 jiwa luka-luka akibat kekerasan yang terjadi. Selain itu, kerusakan infrastruktur juga sangat parah, dengan 7.932 unit rumah hancur dan 510 fasilitas umum terbakar.<sup>3</sup> Angka-angka ini menggambarkan skala kehancuran yang ditimbulkan oleh konflik tersebut.

Konflik Poso menunjukkan dinamika transformasi yang menarik dari konflik yang bersifat realistis menjadi non-realistis. Awalnya, konflik ini berakar pada persaingan politik di kalangan elit lokal, yang oleh para ahli digolongkan sebagai konflik realistis karena didorong oleh tuntutan spesifik seperti perebutan kekuasaan.<sup>1</sup> Namun, pertikaian ini dengan cepat bertransformasi menjadi konflik yang bernuansa SARA, di mana identitas agama dan etnis menjadi alat utama mobilisasi massa, yang dapat dikategorikan sebagai konflik non-realistis karena lebih didorong oleh pelepasan ketegangan dan sentimen.<sup>1</sup> Transformasi ini menunjukkan bagaimana keluhan politik dan ekonomi yang mendasar dapat secara efektif "dibungkus" atau "dibenarkan" oleh sentimen keagamaan, membuat konflik menjadi lebih intens dan sulit untuk diselesaikan. Dinamika ini menyoroti betapa mudahnya perjuangan politik dan ekonomi dapat diselubungi narasi berbasis identitas, yang pada akhirnya membuatnya lebih sulit diatasi dan lebih merusak. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk mengatasi akar penyebab (konflik realistis) daripada hanya fokus pada manifestasinya (konflik non-realistis).

Tabel 1: Dampak Kuantitatif Kerusuhan Poso (1998-2001)

Kategori Dampak	Jumlah/Statistik	Sumber Data
Korban Tewas	577 jiwa	3
Korban Luka-luka	384 jiwa	3
Rumah Hancur	7.932 unit	3
Fasilitas Umum Terbakar	510 unit	3

## B. Para Aktor dan Kelompok yang Terlibat

Konflik Poso melibatkan berbagai aktor dan kelompok dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemicu awal hingga pihak yang berupaya melakukan penanganan.

Kelompok Utama yang Bertikai: Konflik ini melibatkan dua kelompok besar yang secara jelas teridentifikasi berdasarkan agama: kelompok Muslim yang dikenal sebagai "kelompok putih" dan kelompok Kristen yang menamai diri "kelompok merah".<sup>1</sup> Kedua kelompok ini menunjukkan tingkat solidaritas internal yang sangat kuat selama konflik berlangsung, memperkuat identitas in-group mereka dan memperuncing perbedaan dengan out-group.<sup>1</sup>

Tokoh Kunci dan Peran Mereka:

- Pemuda Pemicu: Insiden awal seringkali dipicu oleh perkelahian antar pemuda dari agama yang berbeda. Salah satu insiden krusial adalah penikaman seorang pemuda Muslim oleh pemuda Kristen bernama Roy Runtu Bisalemba pada Malam Natal 1998, yang menjadi percikan api awal.<sup>1</sup>
- Elit Politik Lokal: Oknum elit politik lokal memainkan peran yang sangat krusial dalam memobilisasi massa berdasarkan agama untuk mendukung kepentingan politik mereka, terutama dalam persaingan pemilihan jabatan bupati.<sup>2</sup> Mereka mengeksploitasi isu-isu sensitif seperti dominasi ekonomi pendatang Muslim untuk memancing emosi massa dan menggalang dukungan.<sup>10</sup>
- Pemimpin Milisi: Beberapa figur penting muncul sebagai pemimpin kelompok bersenjata. Dari pihak Kristen, Paulus Tungkanan, seorang mantan anggota Satuan Intel Komando Distrik Militer 1307, dan Fabianus Tibo, yang disebut sebagai pemimpin kelompok Kristen "Kelelawar", memainkan peran signifikan.<sup>1</sup> Di sisi Muslim, kelompok seperti Laskar Jihad

yang dipimpin oleh Ustad Jafar Umar Thalib, dan Laskar Mujahiddin, turut terlibat dengan mengirimkan pasukan dan melatih pemuda lokal, meningkatkan skala kekerasan.<sup>1</sup> Santoso juga menjadi pemimpin kelompok bersenjata yang aktif pasca-Malino.<sup>1</sup>

- Tokoh Agama dan Masyarakat: Beberapa tokoh agama dan elit sosial justru memperparah konflik dengan mengubahnya menjadi perang agama.<sup>5</sup> Namun, terdapat pula contoh positif di mana tokoh masyarakat seperti di Desa Tangkura dan antara kepala Desa Tokorondo (Muslim) dan Desa Masani (Kristen) berhasil mengelola konflik dan melindungi komunitas mereka, menunjukkan potensi peran konstruktif.<sup>5</sup>

Pihak yang Terdampak: Konflik ini secara tidak proporsional berdampak pada warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka menjadi korban langsung kekerasan, pelecehan seksual, kehilangan anggota keluarga, dan terpaksa mengungsi ke hutan atau tempat penampungan darurat.<sup>2</sup> Banyak perempuan menjadi janda dan harus menanggung beban ganda sebagai kepala keluarga, mencari nafkah di tengah keterbatasan dan trauma.<sup>4</sup>

Aktor dalam Upaya Penanganan:

- Pemerintah Pusat dan Daerah: Pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya perdamaian, yang puncaknya adalah penandatanganan Deklarasi Malino.<sup>5</sup> Pemerintah daerah Poso, dengan dukungan pusat, juga mengambil langkah konkret untuk pemulihan pasca-konflik.<sup>12</sup>
- TNI/Polri: Pasukan keamanan dikerahkan dalam jumlah besar untuk meredam kekerasan dan melucuti kelompok bersenjata melalui operasi seperti Operasi Sadar Maleo (2000) dan Operasi Sintuwu Maroso (2004).<sup>1</sup> Namun, penanganan aparat keamanan mendapat kritik karena dinilai tidak adil atau adanya tumpang tindih wewenang dalam penindakan hukum.<sup>9</sup>
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi seperti Search for Common Ground (SFCG) terlibat aktif dalam membangun perdamaian pasca-konflik sejak tahun 2004. SFCG berupaya melalui tiga pilar utama: dialog, media, dan komunitas, serta menyediakan layanan kemanusiaan.<sup>4</sup> Mereka juga melakukan advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu perdamaian.<sup>4</sup>

## C. Kronologi dan Fase-fase Konflik

Konflik Poso berlangsung dalam beberapa fase kekerasan yang intens, dimulai pada 25 Desember 1998 dan secara resmi diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001.<sup>3</sup> Namun, pasca-Malino, gangguan kecil dan aktivitas kelompok bersenjata masih terus terjadi, menunjukkan bahwa perdamaian yang dicapai masih rapuh.<sup>1</sup>

### **Fase I: Desember 1998 (Pemicu Awal dan Eskalasi)**

Konflik dimulai dengan keributan antara seorang pemuda Kristen (Roy Runtu Bisalemba) dan seorang pemuda Muslim (Ahmad Ridwan) pada 24 Desember 1998, yang dengan cepat

berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama. Insiden ini bertepatan dengan perayaan Natal dan bulan puasa, serta situasi politik pemilihan Bupati yang sedang memanas. Massa Muslim menyerang dan membakar Toko Lima, yang diyakini sebagai tempat persembunyian Roy dan distributor minuman keras, serta tempat hiburan lainnya. Sebagai balasan, Herman Parimo memimpin kelompok Kristen membakar 81 rumah Muslim.

### **Fase II: April 2000 (Intensifikasi Politik dan Kekerasan)**

Kerusuhan kembali pecah pada 16 April 2000, dipicu oleh perkelahian antar pemuda dari Lambogia dan Kayamanya di Lawanga, serta persaingan politik menjelang pemilihan pejabat daerah. Rumor mengenai penyalahgunaan dana untuk menyewa massa guna menyerang gedung pengadilan juga beredar, memperkeruh suasana. Penyerangan dan pembakaran 127 rumah warga Kristen, 2 gereja, dan sekolah Kristen terjadi, menyebabkan ribuan warga mengungsi.

### **Fase III: Mei 2000 - Desember 2001 (Puncak Kekerasan dan Pembentukan Milisi)**

Periode ini menandai pertempuran terbesar dan terparah, melibatkan seluruh elemen masyarakat Kristen dan Muslim dengan tingkat solidaritas kelompok yang sangat kuat. Terjadi serangan balasan kelompok Kristen terhadap Muslim, penculikan, dan pembunuhan massal, termasuk insiden tragis di Pondok Pesantren Walisongo. Kelompok Kristen membentuk pasukan khusus "Kelelawar" yang dipimpin Tibo, sementara Muslim membentuk "Laskar Jihad" yang dipimpin Ustad Jafar Umar Thalib, serta "Laskar Mujahiddin", yang secara signifikan meningkatkan skala dan intensitas kekerasan.

### **Akhir Konflik: Deklarasi Malino (20 Desember 2001)**

Pemerintah pusat memfasilitasi perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam yang dikenal sebagai Deklarasi Malino. Deklarasi ini berisi sepuluh prinsip yang disepakati untuk mengakhiri perselisihan, menegakkan hukum, menjamin keamanan, dan memulihkan kehidupan masyarakat.

Dinamika Pasca-Malino: Meskipun Deklarasi Malino ditandatangani, Poso masih mengalami gangguan kecil berupa aksi teror terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Aktivitas ini kemudian berfokus pada kepolisian, memicu baku tembak dengan kelompok bersenjata seperti yang dipimpin Santoso.<sup>1</sup> Operasi militer seperti "Operasi Tinombala" dilancarkan untuk menangkap kelompok ini.<sup>1</sup>

Kronologi yang terperinci ini menunjukkan pola berulang: insiden kecil yang memicu eskalasi cepat akibat ketegangan yang mendasari dan eksploitasi politik, diikuti oleh puncak kekerasan, dan kemudian perjanjian damai formal (Malino). Namun, dinamika pasca-Malino yang terus berlanjutnya "gangguan kecil" dan munculnya kelompok bersenjata seperti Santoso<sup>1</sup> menunjukkan bahwa perdamaian yang dicapai sangat rapuh. Hal ini mengindikasikan bahwa akar masalah dan dendam yang mendalam tidak sepenuhnya teratasi, atau implementasi perjanjian damai memiliki kelemahan. Pernyataan bahwa "kesalahan penanganan polisi

terhadap perjanjian Malino" turut berkontribusi pada lamanya konflik<sup>1</sup> menyoroti kegagalan krusial dalam manajemen pasca-konflik. Sebuah perjanjian damai formal hanyalah titik awal. Perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan implementasi yang komprehensif dan adil, menangani keluhan-keluhan mendasar, membangun kembali kepercayaan, dan memastikan penegakan hukum yang tidak memihak. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan kekerasan kembali muncul atau bentuk-bentuk konflik baru, meskipun bentrokan berskala besar awal telah mereda.

## D. Wilayah Konflik

Konflik Poso secara spesifik terjadi di wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>2</sup> Lokasi geografis ini memiliki karakteristik demografi dan sosial-ekonomi yang menjadi latar belakang penting bagi pecahnya konflik.

### Demografi dan Kondisi Sosial-Ekonomi:

Secara demografis, masyarakat lokal Poso yang mayoritas Kristen umumnya bermukim di wilayah tengah dan pegunungan. Sementara itu, wilayah pesisir dan perkotaan banyak didiami oleh penduduk pendatang yang mayoritas beragama Islam, terutama dari etnis Bugis dan Makassar. Kedatangan para pendatang ini seiring dengan dinamika pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan perkebunan kelapa, coklat, dan cengkeh.

Distribusi spasial kelompok etnis dan agama ini secara langsung terkait dengan ketimpangan ekonomi. Para pendatang seringkali lebih sukses dalam bidang perdagangan dan bisnis, mendominasi pasar dan pusat ekonomi di Poso. Mereka juga banyak mengakuisisi lahan dari penduduk lokal, yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan kecemburuan.<sup>6</sup> Segregasi geografis dan ekonomi ini menciptakan dinamika "kelompok dalam" (in-group) dan "kelompok luar" (out-group) yang jelas, di mana kedekatan fisik di beberapa area (misalnya Lawanga) dapat dengan mudah berubah menjadi titik-titik konflik.<sup>1</sup> Perkembangan ini menunjukkan bahwa distribusi geografis komunitas, terutama ketika terkait dengan peran ekonomi dan persepsi kontrol sumber daya, dapat memperburuk ketegangan sosial. Urbanisasi dan pembangunan ekonomi, jika tidak dikelola secara adil dan merata, dapat menciptakan bentuk-bentuk marginalisasi dan persaingan baru yang menjadi lahan subur bagi konflik.

## E. Akar Masalah dan Pemicu Konflik

Konflik Poso adalah fenomena multi-faktor yang sangat kompleks, dan bukan hanya sekedar masalah agama semata.<sup>2</sup> Berbagai elemen saling berinteraksi membentuk akar masalah dan pemicu yang mendalam.

Tabel 2: Akar Masalah dan Pemicu Konflik Poso

Kategori Faktor	Deskripsi Singkat/Contoh Spesifik	Sumber Data
Faktor Historis dan Demografis	Marginalisasi penduduk asli Poso (Pamona, Mori, Lore, mayoritas Kristen) oleh penduduk pendatang (Jawa, Bugis, Makassar, mayoritas Muslim) dan program transmigrasi yang dianggap menguntungkan pendatang. <sup>2</sup>	2
Faktor Ekonomi	Ketimpangan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang; dominasi pendatang dalam perdagangan dan bisnis; penduduk asli merasa terpinggirkan dan kesulitan bersaing; peralihan kepemilikan lahan; program transmigrasi yang memicu kecemburuan sosial. <sup>6</sup>	6
Faktor Politik	Persaingan elit politik lokal dalam pemilihan Bupati Poso; tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit Kristen dan Islam; kekalahan calon memicu mobilisasi massa; insiden kecil dieksploitasi untuk kepentingan politik. <sup>2</sup>	2
Faktor Agama dan Etnis	Sentimen agama dan etnis dieksploitasi; bentrokan kecil antar pemuda berkembang menjadi kerusuhan bernuansa	2

	agama; isu provokasi dan aksi balas dendam antar kelompok agama. <sup>2</sup>	
Faktor Eksternal	Munculnya kelompok milisi berbasis agama (Laskar Jihad, Pasukan Kelelawar Hitam) pasca-Reformasi 1998 yang mengirimkan pasukan ke Poso; isu keterlibatan oknum aparat keamanan yang memihak salah satu kubu. <sup>1</sup>	1

Konflik Poso secara konsisten menunjukkan adanya banyak faktor yang saling terkait: marginalisasi historis, ketimpangan ekonomi, persaingan politik, serta identitas agama dan etnis.<sup>2</sup> Konsep "diagram bawang" (onion diagram) yang menggambarkan faktor-faktor konflik sangat relevan di sini.<sup>2</sup> Diagram ini menunjukkan bahwa meskipun agama mungkin merupakan "lapisan terluar" atau penyebab yang paling terlihat, lapisan yang lebih dalam adalah perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Ini menyiratkan bahwa mengatasi hanya aspek keagamaan tanpa menangani ketidaksetaraan ekonomi, eksklusi politik, dan keluhan historis tidak akan efektif. Resolusi konflik yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang

interaksi antara berbagai faktor ini. Intervensi harus bersifat holistik, menargetkan tidak hanya gejala (misalnya, kekerasan antar agama) tetapi juga masalah struktural yang mendasar (misalnya, marginalisasi ekonomi, ketidakseimbangan kekuasaan politik) yang membuat komunitas rentan terhadap konflik.

## F. Dinamika Eskalasi dan Upaya Penanganan

Dinamika kerusuhan Poso menunjukkan pola eskalasi yang kompleks, dimulai dari insiden kecil hingga menjadi konflik komunal berskala besar, serta upaya-upaya penanganan yang dilakukan.

### Mekanisme Eskalasi:

Konflik berawal dari insiden kecil, seperti perkelahian antar pemuda, yang kemudian disulut oleh penyebaran rumor dan provokasi yang tidak akurat.<sup>3</sup> Elit politik lokal memainkan peran sentral dalam proses ini, memanfaatkan sentimen SARA untuk memobilisasi massa demi kepentingan politik mereka. Hal ini mengubah pertikaian personal menjadi konflik komunal berskala besar.<sup>2</sup> Solidaritas kelompok yang kuat di antara kedua belah pihak, yang

mengidentifikasi diri sebagai kelompok "putih" (Muslim) dan "merah" (Kristen), memperkuat struktur in-group dan out-group, memicu aksi balas dendam dan kekerasan yang meluas.<sup>1</sup>

Peran Mobilisasi Massa dan Simbol-simbol Identitas: Penggunaan simbol-simbol agama, seperti bendera putih untuk Muslim dan bendera merah untuk Kristen, serta pembentukan milisi bersenjata seperti "Kelelawar" (Kristen) dan "Laskar Jihad" (Muslim), menunjukkan bagaimana identitas kolektif diperkuat untuk memicu dan mempertahankan konflik.<sup>1</sup> Simbol-simbol ini menjadi alat ampuh untuk menyatukan kelompok dan mengobarkan semangat "perang suci".<sup>5</sup>

#### **Upaya Pemerintah dalam Meredam Konflik:**

- Operasi Keamanan: Pemerintah mengerahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar dan menggelar operasi militer, seperti Operasi Sadar Maleo (tahun 2000) dan Operasi Sintuwu Maroso (pertengahan April 2004), untuk meredam kekerasan dan melucuti kelompok bersenjata.<sup>1</sup> Satuan tugas TNI dan Polri dari berbagai daerah, termasuk Brimob Polda Papua, Kalimantan Timur, dan Kelapa Dua Bogor, dikerahkan untuk tujuan ini.<sup>3</sup>
- Perjanjian Damai: Puncak upaya ini adalah penandatanganan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001, sebuah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam yang difasilitasi oleh pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Meskipun operasi keamanan dan perjanjian damai telah dilaksanakan, berlanjutnya kekerasan pasca-Malino dan masih adanya ketidakpercayaan yang mendalam<sup>1</sup> menunjukkan adanya kesenjangan. Fokus pemerintah pada langkah-langkah keamanan dan perjanjian formal, meskipun diperlukan, mungkin belum cukup mengatasi keluhan sosial-ekonomi dan politik yang mendasar, atau trauma psikologis yang dialami masyarakat. Kritik terhadap "kesalahan penanganan polisi terhadap perjanjian Malino"<sup>1</sup> dan peran pemerintah yang dinilai "minim" dalam deradikalisasi/rekonsiliasi<sup>15</sup> mengindikasikan adanya celah dalam manajemen pasca-konflik yang komprehensif. Pendekatan yang semata-mata berpusat pada keamanan atau perjanjian damai dari atas ke bawah, tanpa rekonsiliasi komunitas yang tulus, penanganan akar masalah, dan penegakan keadilan yang adil, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini dapat menekan kekerasan tetapi tidak menyelesaikan konflik, meninggalkan lahan subur bagi gejolak di masa depan atau radikalisasi.

### **III. Dampak Konflik Poso**

Konflik Poso meninggalkan jejak dampak yang sangat mendalam dan kompleks di berbagai aspek kehidupan masyarakat, jauh melampaui kerugian fisik dan korban jiwa.

#### **Dampak Sosial, Ekonomi, dan Politik**

##### **Disintegrasi Sosial**

Konflik menyebabkan masyarakat Poso terpecah belah menjadi dua kelompok yang sulit dilebur kembali, bahkan memicu segregasi pemukiman berdasarkan agama.<sup>9</sup> Nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, dan kesatuan yang sebelumnya menjadi bingkai hubungan sosial masyarakat Poso runtuh.<sup>9</sup> Kerusakan modal sosial, khususnya kepercayaan, menjadi sangat parah. Deskripsi tentang "disintegrasi sosial," "runtuhnya nilai-nilai kebersamaan," "hilangnya kepercayaan," dan "segregasi pemukiman"<sup>9</sup> secara kolektif menunjukkan erosi parah terhadap modal sosial, terutama kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi fundamental bagi perilaku kooperatif dan kohesi sosial. Ketika kepercayaan hancur, komunitas menjadi terfragmentasi, menghambat tindakan kolektif untuk pemulihan dan membuat mereka rentan terhadap konflik di masa depan. Pernyataan bahwa "masyarakat Poso faktual masih terikat oleh ingatan konflik di masa lalu yang menghambat proses damai sejati"<sup>13</sup> secara langsung mendukung kondisi ini. Pemulihan pasca-konflik harus memprioritaskan pembangunan kembali modal sosial, terutama kepercayaan, melalui dialog antar-kelompok yang berkelanjutan, peluang ekonomi bersama, dan demonstrasi keadilan serta keadilan yang terlihat. Tanpa ini, perjanjian damai formal akan tetap bersifat dangkal.

### **Kerugian Ekonomi**

Roda perekonomian terhenti total, menyebabkan banyak pengusaha memilih meninggalkan Poso. Hal ini berujung pada munculnya pengangguran, kelangkaan kesempatan kerja, dan rawan pangan di masyarakat.<sup>9</sup> Selain itu, terjadi kehilangan faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat secara luas, seperti sawah, tanaman kebun, mesin penggilingan padi, traktor tangan, rumah makan, dan hotel.<sup>9</sup>

### **Dampak Politik**

Konflik mengakibatkan terhentinya roda pemerintahan daerah dan jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah di mata masyarakat. Sikap demokratis dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat antar kelompok kepentingan juga hilang, digantikan oleh legalisasi pemaksaan kehendak kelompok tertentu dalam mencapai tujuannya.<sup>9</sup>

## **Dampak Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM**

Konflik Poso digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) karena tindakan yang dilakukan secara sengaja tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan ini mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis yang parah, serta serangan diskriminatif berdasarkan agama dan etnis.<sup>4</sup> Berbagai bentuk pelanggaran HAM berat terjadi, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap anak dan orang tua, serta pelecehan seksual.<sup>9</sup>

Dampak konflik terhadap perempuan dan anak-anak sangat disproportional. Mereka digambarkan memiliki "kapasitas rendah untuk menyelamatkan diri atau melakukan perlawanan"<sup>4</sup>, menjadikan mereka objek yang rentan dalam konflik. Perempuan menghadapi "beban ganda" sebagai orang tua tunggal, kesulitan ekonomi, dan kerentanan ekstrim terhadap

kekerasan seksual, yang bahkan memicu pembentukan "Kampung Janda" sebagai bentuk komunitas dukungan.<sup>4</sup> Angka korban sipil yang tinggi, di mana 80% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak dalam beberapa konflik, semakin menggarisbawahi kerentanan ini.<sup>4</sup> Oleh karena itu, respons konflik dan upaya pemulihan pasca-konflik harus mengadopsi pendekatan yang sensitif gender dan berfokus pada anak. Ini mencakup penyediaan dukungan khusus untuk pemulihan trauma, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, perlindungan dari kekerasan seksual, dan memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan serta kebutuhan dasar. Mengakui dan mengatasi kerentanan spesifik ini sangat penting untuk penyembuhan masyarakat yang sejati.

## **Dampak Psikologis dan Kohesi Sosial**

Konflik meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban dan saksi mata, dengan banyak warga yang mengalami PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder).<sup>2</sup> Munculnya perasaan dendam dan ketidakpercayaan yang mendalam tidak hanya terjadi antara kelompok yang bertikai, tetapi juga antara masyarakat dengan aparat keamanan.<sup>1</sup> Luka masa lalu masih membekas dan secara signifikan menghambat proses damai sejati dan rekonsiliasi yang berkelanjutan.<sup>13</sup>

## **IV. Pelajaran Penting dan Rekomendasi Pencegahan Konflik**

Pengalaman pahit dari kerusuhan Poso memberikan pelajaran krusial yang harus dipetik untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan, tidak hanya di Poso tetapi juga di seluruh Indonesia.

### **A. Pentingnya Pengelolaan Keberagaman dan Toleransi**

Indonesia, sebagai negara majemuk, harus memiliki strategi yang tepat dan proaktif dalam mengelola perbedaan etnis, agama, dan budaya agar tidak menjadi sumber konflik.<sup>10</sup> Sebelum konflik, masyarakat Poso digambarkan hidup dalam "suasana damai yang harmonis".<sup>1</sup> Namun, "harmoni" ini terbukti rapuh, hancur di bawah tekanan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi politik. Pelajaran penting di sini adalah bahwa sekadar koeksistensi pasif (hidup berdampingan) tidaklah cukup. Upaya aktif untuk membangun

kohesi dan pemahaman antar-kelompok melalui pendidikan multikultural dan nilai-nilai bersama (seperti kearifan lokal "Sintuwu Maroso" yang berarti kebersamaan dan persatuan) sangat

diperlukan untuk menciptakan ketahanan terhadap pemicu konflik.<sup>6</sup> Pendidikan multikultural, yang di Poso dikenal sebagai "Pendidikan Harmoni," telah terbukti menjadi solusi efektif. Ini mencakup penanaman nilai-nilai kearifan lokal dan belajar saling menghormati, pengertian, toleran, peduli, kasih sayang, tanggung jawab sosial, dan solidaritas.<sup>6</sup> Pembangunan perdamaian tidak boleh berasumsi bahwa ketiadaan konflik berarti harmoni sejati. Langkah-langkah proaktif untuk menumbuhkan dialog antar-komunal, identitas bersama, dan saling menghormati sangat penting untuk mengubah koeksistensi pasif menjadi kohesi sosial yang kuat, membuat komunitas tidak mudah dimanipulasi.

## **B. Bahaya Politisasi Identitas dan Perlunya Pemerataan Pembangunan**

Para elit politik harus menghindari eksploitasi sentimen SARA demi kepentingan elektoral jangka pendek, karena praktik ini dapat memicu konflik yang sangat destruktif.<sup>10</sup> Ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat harus diatasi secara serius untuk mencegah kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik.<sup>10</sup> Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan modal serta pelatihan bagi kelompok rentan sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini.<sup>10</sup>

Konflik Poso bertepatan dengan era desentralisasi<sup>2</sup>, yang menggeser dinamika kekuasaan ke tingkat lokal. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberdayakan komunitas lokal, tanpa mekanisme yang tepat untuk distribusi sumber daya yang adil dan pembagian kekuasaan politik, hal itu dapat mengintensifkan persaingan di antara elit dan kelompok lokal. Hal ini terlihat di Poso, di mana pemilihan Bupati menjadi titik nyala konflik.<sup>2</sup> Dominasi ekonomi pendatang dan marginalisasi penduduk asli diperparah oleh pergeseran ini. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi harus dirancang dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk mencegah eksaserbasi ketidaksetaraan yang sudah ada dan persaingan antar-kelompok. Ini mencakup pedoman yang jelas untuk pembagian kekuasaan, alokasi sumber daya yang transparan, dan mekanisme untuk menangani keluhan terkait disparitas ekonomi, terutama di wilayah yang beragam.

## **C. Urgensi Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik**

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kepekaan tinggi terhadap potensi-potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang proaktif sebelum konflik meletus.<sup>10</sup> Konflik Poso berulang kali meningkat dari "bentrokan kecil" menjadi kekerasan yang meluas karena "rumor dan provokasi".<sup>3</sup> Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem peringatan dini dan respons awal. Pelajaran yang dapat diambil bukan hanya tentang bagaimana mengelola konflik setelah meletus, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi ketegangan mendasar serta pemicu potensial

sebelum semuanya lepas kendali. Hal ini memerlukan pengumpulan informasi yang kuat, pemantauan di tingkat komunitas, dan upaya mediasi yang proaktif. Investasi dalam sistem

peringatan dini, inisiatif perdamaian berbasis komunitas, dan mekanisme respons cepat untuk perselisihan kecil sangat penting. Ini akan menggeser paradigma dari manajemen krisis menjadi pencegahan konflik yang proaktif, yang pada akhirnya akan menyelamatkan nyawa dan sumber daya dalam jangka panjang.

## **D. Peran Krusial Dialog Antar Komunitas dan Penegakan Hukum yang Adil**

Forum-forum dialog lintas agama dan budaya harus terus diperkuat sebagai sarana vital untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan antar komunitas.<sup>10</sup> Tokoh-tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam upaya rekonsiliasi ini.<sup>10</sup> Selain itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak memihak dalam menangani pelaku kekerasan, terlepas dari latar belakang mereka.<sup>10</sup> Kegagalan pemerintah dalam menciptakan rasa aman dan adanya tumpang tindih wewenang antara Polri dan TNI dikritik sebagai faktor yang memperburuk situasi.<sup>9</sup>

Data menunjukkan adanya kerusakan signifikan dalam kepercayaan terhadap aparat keamanan dan lembaga pemerintah karena dugaan keberpihakan, kesalahan penanganan, dan kurangnya akuntabilitas.<sup>1</sup> Ketidakpercayaan ini merupakan hambatan besar bagi perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak bukan hanya tentang keadilan; ini tentang membangun kembali legitimasi dan kredibilitas negara di mata warganya, yang sangat penting untuk ketertiban dan stabilitas sosial. Di luar perjanjian damai formal, komponen penting dari pemulihan pasca-konflik adalah reformasi kelembagaan, khususnya dalam sektor keamanan dan peradilan. Ini mencakup pelatihan tentang hak asasi manusia, imparialitas, dan kepolisian komunitas, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk penyalahgunaan wewenang. Membangun kembali kepercayaan pada lembaga negara sama vitalnya dengan kepercayaan antar-komunal untuk perdamaian jangka panjang.

## **E. Pendekatan Komprehensif dalam Pemulihan Pasca-Konflik**

Pemulihan pasca-konflik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi cepat.

**Rehabilitasi dan Rekonstruksi:** Program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak, seperti rumah, sekolah, dan rumah ibadah, sangat diperlukan, dengan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.<sup>10</sup>

**Rekonsiliasi Berkelanjutan:** Proses rekonsiliasi dan pemulihan pasca-konflik bukanlah hal yang mudah dan cepat, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Ini termasuk penanganan khusus bagi para pengungsi, program pemulangan, dan

pemberian kompensasi bagi mereka yang kehilangan harta benda.<sup>10</sup>

Pemberdayaan Ekonomi: Mengurangi kesenjangan sosial melalui program pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengatasi akar konflik yang mendasar.<sup>10</sup> Pelajaran dari Poso secara konsisten menyoroti perlunya "komitmen jangka panjang" dan "upaya komprehensif" <sup>10</sup> untuk pemulihan. Ini melampaui respons krisis langsung menuju pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan penyembuhan sosial. Fakta bahwa Poso masih menghadapi tantangan bertahun-tahun kemudian <sup>13</sup> menggarisbawahi bahwa perbaikan cepat tidak akan memadai. Pemulihan pasca-konflik harus dilihat sebagai proses pembangunan jangka panjang yang mengintegrasikan inisiatif keamanan, keadilan, pembangunan ekonomi, dan kohesi sosial. Ini memerlukan kemauan politik yang berkelanjutan, sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua tingkatan masyarakat.

## **F. Peran Aktif Masyarakat Sipil dan Pendidikan Multikultural**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional seperti Search for Common Ground (SFCG) memainkan peran penting dalam membangun perdamaian melalui dialog, media, dan komunitas, serta menyediakan layanan kemanusiaan dan advokasi.<sup>4</sup> Mereka juga melakukan analisis dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu perdamaian.<sup>4</sup>

Peran perempuan dalam ketahanan masyarakat pasca-konflik sangat menonjol. Melalui aktivitas ekonomi mereka, mengurus keluarga dan anak, serta jaringan komunitas, perempuan membantu mencegah disintegrasi sosial lebih lanjut di tengah kekerasan dan ketidakamanan.<sup>14</sup> Pembentukan "Kampung Janda" adalah contoh nyata inisiatif masyarakat sipil yang muncul untuk mendukung korban perempuan.<sup>4</sup> Inisiatif ini menunjukkan ketahanan luar biasa komunitas itu sendiri, terutama perempuan, yang membentuk jaringan dukungan meskipun menghadapi trauma yang besar dan kegagalan negara. Selain itu, keberhasilan inisiatif pendidikan multikultural yang didorong di tingkat lokal <sup>6</sup> menunjukkan bahwa upaya akar rumput yang dipimpin komunitas sangat penting. Inisiatif-inisiatif ini sering mengisi celah yang ditinggalkan oleh intervensi formal negara dan lebih efektif dalam membangun kembali kepercayaan di tingkat akar rumput. Sementara intervensi negara diperlukan, perdamaian yang berkelanjutan pada akhirnya dibangun dari bawah ke atas. Mendukung dan memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal, pemimpin komunitas, dan kelompok perempuan dalam upaya pembangunan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan ekonomi sangatlah vital. Aktor-aktor lokal ini seringkali memiliki pemahaman unik dan legitimasi dalam komunitas mereka yang tidak dimiliki oleh aktor eksternal.

## **V. Kesimpulan dan Rekomendasi**

## Rangkuman Temuan Utama

Analisis mendalam terhadap kerusuhan Poso mengungkapkan bahwa konflik ini adalah fenomena komunal multidimensional yang berakar pada ketimpangan ekonomi yang mendalam, persaingan politik di kalangan elit lokal, dan masalah historis terkait marginalisasi penduduk asli. Faktor-faktor ini dieksploitasi dan diperparah melalui sentimen agama dan etnis. Konflik berlangsung dalam beberapa fase kekerasan yang intens, melibatkan mobilisasi massa dan intervensi milisi eksternal, serta meninggalkan dampak kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan psikologis yang parah, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun Deklarasi Malino pada tahun 2001 berhasil mengakhiri fase kekerasan berskala besar, tantangan pemulihan kepercayaan, kohesi sosial, dan penanganan trauma masih berlanjut hingga kini. Penanganan pasca-konflik yang belum sepenuhnya komprehensif, termasuk kritik terhadap peran aparat keamanan, turut berkontribusi pada fragilitas perdamaian.

## Pelajaran Penting dan Rekomendasi untuk Masa Depan Indonesia

Pengalaman Poso memberikan pelajaran krusial yang harus diinternalisasi untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan, tidak hanya di Poso tetapi di seluruh wilayah Indonesia yang majemuk. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi utama dapat dirumuskan:

1. **Pengelolaan Keberagaman yang Proaktif dan Inklusif:** Pemerintah dan masyarakat harus mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengelola keberagaman etnis, agama, dan budaya secara proaktif. Ini berarti bergerak melampaui koeksistensi pasif menuju pembangunan kohesi sosial yang aktif melalui dialog antar-komunitas yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai toleransi, dan pemahaman lintas budaya. Pendidikan multikultural, seperti "Pendidikan Harmoni" di Poso, harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional dan inisiatif komunitas untuk menanamkan rasa saling menghormati dan solidaritas sejak dini.
2. **Pemberantasan Politisasi Identitas dan Pemerataan Pembangunan:** Elit politik harus berkomitmen untuk tidak mengeksploitasi sentimen SARA demi kepentingan politik jangka pendek. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap provokator dan mobilisator berbasis identitas. Secara paralel, pemerintah harus memprioritaskan pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial antar kelompok masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi yang adil dan inklusif, serta peninjauan kembali kebijakan yang berpotensi memicu marginalisasi (seperti transmigrasi atau distribusi lahan), sangat penting untuk menghilangkan akar kecemburuan sosial.
3. **Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Respons Cepat:** Pemerintah dan masyarakat harus membangun dan memperkuat sistem deteksi dini konflik yang efektif. Ini mencakup

peningkatan kapasitas intelijen komunitas, pembentukan forum mediasi lokal untuk menyelesaikan perselisihan kecil sebelum eskalasi, dan mekanisme respons cepat yang terkoordinasi untuk meredam potensi konflik pada tahap awal. Pendekatan ini akan menggeser fokus dari manajemen krisis reaktif menjadi pencegahan konflik proaktif.

4. Penegakan Hukum yang Adil dan Reformasi Institusi Keamanan: Aparat penegak hukum harus bertindak tegas, profesional, dan tidak memihak dalam menangani pelaku kekerasan, terlepas dari latar belakang mereka. Reformasi institusi keamanan, termasuk pelatihan hak asasi manusia, penegakan hukum yang imparial, dan pengembangan model kepolisian komunitas, sangat krusial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk penyalahgunaan wewenang juga harus ditegakkan.
5. Pendekatan Komprehensif dan Berkelanjutan dalam Pemulihan: Pemulihan pasca-konflik harus dilihat sebagai proses jangka panjang yang mengintegrasikan berbagai aspek: rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik, program pemberdayaan ekonomi, penanganan trauma psikologis (terutama bagi perempuan dan anak-anak), serta rekonsiliasi sosial yang mendalam. Komitmen politik yang berkelanjutan, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua tingkatan masyarakat, termasuk masyarakat sipil, adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang lestari.
6. Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Peran Perempuan: Mendukung dan memberdayakan organisasi masyarakat sipil lokal, pemimpin komunitas, dan kelompok perempuan dalam upaya pembangunan perdamaian dan pemulihan adalah vital. Inisiatif akar rumput ini seringkali memiliki legitimasi dan pemahaman unik tentang dinamika lokal yang tidak dimiliki oleh aktor eksternal, dan dapat menjadi katalisator efektif untuk membangun kembali kepercayaan dan kohesi sosial dari bawah ke atas.

Pengalaman Poso adalah pengingat yang menyakitkan akan kerapuhan persatuan dalam masyarakat majemuk jika akar masalah tidak ditangani dan keberagaman tidak dikelola dengan bijaksana. Dengan mengimplementasikan pelajaran-pelajaran ini, Indonesia dapat memperkuat ketahanan sosialnya dan membangun masa depan yang lebih damai dan harmonis.

## Karya yang dikutip

1. DINAMIKA KONFLIK DI KABUPATEN POSO Adam (Dosen Fakultas ..., diakses Juni 19, 2025, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/ist/article/download/134/83/>
2. SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman, diakses Juni 19, 2025, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/suarga/article/download/7450/3020/20134>
3. Kronologi Kerusuhan Poso (pasca 2002) - Ambisius Wiki, diakses Juni 19, 2025, [https://wiki.ambisius.com/peristiwa-konflik/kerusuhan-poso-\(pasca-2002\)/kronologi](https://wiki.ambisius.com/peristiwa-konflik/kerusuhan-poso-(pasca-2002)/kronologi)

4. Konflik Di Poso | PDF - Scribd, diakses Juni 19, 2025, <https://id.scribd.com/document/561217658/KONFLIK-DI-POSO>
5. Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001) - CORE Reader, diakses Juni 19, 2025, <https://core.ac.uk/download/pdf/267825143.pdf>
6. Pembelajaran Toleransi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat Plural: Belajar dari Penyelesaian Konflik Sosial di Poso - E-PROCEEDINGS UMP, diakses Juni 19, 2025, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/download/663/679/827>
7. ESENSI AGAMA DALAM KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN POSO MENGGUNAKAN TEORI KARL MARX - Portal Jurnal Perkumpulan Ahli Bimbingan dan Konseling Islam, diakses Juni 19, 2025, <https://jurnal.pabki.org/index.php/aiccra/article/download/171/87>
8. Kronologi Kerusuhan Poso - Ambisius Wiki, diakses Juni 19, 2025, <https://wiki.ambisius.com/peristiwa-konflik/kerusuhan-poso/kronologi>
9. Dampak Kerusuhan Poso - Ambisius Wiki, diakses Juni 19, 2025, <https://wiki.ambisius.com/peristiwa-konflik/kerusuhan-poso/dampak>
10. Mengungkap Penyebab Konflik Poso, Analisis Mendalam Konflik Berkepanjangan di Sulawesi Tengah - Feeds Liputan6.com, diakses Juni 19, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5959355/mengungkap-penyebab-konflik-poso-analisis-mendalam-konflik-berkepanjangan-di-sulawesi-tengah>
11. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang 1.1. Konflik adalah ..., diakses Juni 19, 2025, <https://eprints.undip.ac.id/75222/2/2. BAB I HC.pdf>
12. Rekonstruksi Persatuan Pascakonflik Poso Sebagai Implementasi Nilai Ketiga Pancasila dalam Membangun Harmoni Nasional - CIRAJA, diakses Juni 19, 2025, <https://journal.ciraja.com/index.php/JUKAS/article/download/88/70/296>
13. kehidupan pasca konflik dan ketegangan relasi sosial: suatu ancaman kehancuran social capital trust - ResearchGate, diakses Juni 19, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/352658185\\_KEHIDUPAN\\_PASCA\\_KONFLIK\\_DAN\\_KETEGANGAN\\_RELASI\\_SOSIAL\\_SUATU\\_ANCAMAN\\_KEHANCURAN\\_SOCIAL\\_CAPITAL\\_TRUST](https://www.researchgate.net/publication/352658185_KEHIDUPAN_PASCA_KONFLIK_DAN_KETEGANGAN_RELASI_SOSIAL_SUATU_ANCAMAN_KEHANCURAN_SOCIAL_CAPITAL_TRUST)
14. Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso - HD Centre, diakses Juni 19, 2025, <https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2016/07/64BahasaIndonesiaversion-June-2011.pdf>
15. Radikalisasi dan Deradikalisasi: Belajar dari Konflik Poso - PUSAD Paramadina, diakses Juni 19, 2025, <https://www.paramadina-pusad.or.id/radikalisasi-dan-deradikalisasi-belajar-dari-konflik-po>

so/